BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara.” Salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di wilayah pabeaan yang ditetapkan secara bertingkat di setiap tahap produksi dan distribusi.” PPN berkaitan dengan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga PPN dikenakan pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh wajib pajak, baik yang berbentuk badan maupun orang pribadi. PKP harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan PPN. Selain itu, PKP harus melakukan penyetoran dan pelaporan PPN setiap bulan. Menurut Sakti & Hidayat (2016) “penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan. Sementara itu, PKP harus menyampaikan SPT Masa PPN selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak.”

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inovasi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Salah satu contoh yaitu faktur pajak yang mengalami perkembangan dari

yang awalnya dibuat secara manual hingga dibuat dalam bentuk elektronik. Pembuatan faktur pajak secara elektronik dulunya menggunakan aplikasi e-faktur desktop. Aplikasi e-faktur desktop adalah aplikasi yang disediakan oleh DJP yang dapat di *instal* pada PC atau komputer dan diakses secara *offline* (Asmarani, 2020). Aplikasi ini digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dalam jumlah banyak dan faktur pajak tersebut diunggah ke sistem DJP agar dapat disetujui. Kemudian untuk pelaporan SPT Masa PPN, pengguna e-faktur desktop harus menggunakan e-faktur web. E-faktur web merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara *online* di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi internet, serta digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN (Maulida, 2024). Dalam penggunaan aplikasi e-faktur desktop dan e-faktur web, PKP kadang menghadapi beberapa kendala. Misalnya saat melakukan impor data di aplikasi e-faktur dekstop terdapat pajak masukan yang terekam ganda sehingga harus dicek lagi satu per satu faktur pajaknya kemudian dihapus. Selain itu PKP juga harus mengingat akun dan password dari setiap aplikasi dan *website* yang digunakan karena aksesnya berbeda mulai dari pembuatan faktur sampai pelaporan SPT Masa PPN sehingga menghambat efisiensi pekerjaan PKP.

DJP terus melakukan evaluasi dari kritik dan masukan oleh wajib pajak sehingga adanya upaya efisiensi penggunaan aplikasi yang diintegrasikan melewati satu pintu. Akhirnya, DJP meluncurkan sebuah sistem inti administrasi perpajakan yang mencakup semuanya yang dinamakan *Coretax*. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Pasal 4 ayat (1) bahwa “pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dilaksanakan secara elektronik.” DJP mengimplementasikan sistem *Coretax* untuk meningkatkan efisiensi dan menggabungkan semua proses bisnis inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan pemeriksaan pajak. Penerapan sistem *Coretax* di Indonesia mulai berlaku efektif per 1 Januari 2025 bersamaan dengan perubahan tarif PPN.

Perhitungan PPN terutang dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 1 ayat (17), menyatakan bahwa “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.” Nilai lain digunakan sebagai DPP yang juga diatur dalam peraturan Menteri keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.”

Penulis saat ini melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Jasa Konsultasi Bersama (JKB). JKB merupakan kantor jasa konsultasi di bidang akuntansi dan perpajakan yang didirikan pada tahun 2019 dan berlokasi di Surabaya. Salah satu *client* JKB adalah PT Y yang telah bekerja sama sejak bulan November 2024. PT Y merupakan wajib pajak badan yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek PPN dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan sepatu. PT Y menggunakan strategi pemasaran *online* dan *offline* untuk menjual produknya. PT Y berdiri sejak bulan November 2024 dan pada bulan tersebut juga telah dikukuhkan sebagai PKP sehingga perusahaan ini wajib untuk melakukan perhitungan dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. PT Y tidak memiliki staf pajak dan hanya memiliki staf *finance & accounting* yang bertugas membuat pencatatan keuangan perusahaan sehingga untuk perhitungan hingga pelaporan SPT Masa PPN dikerjakan oleh Konsultan JKB. Perhitungan PPN pada PT Y sedikit berbeda karena perusahaan tersebut memanfaatkan *marketplace* dalam penjualan barang secara *online*

sehingga PT Y tidak menerbitkan faktur pajak keluaran melainkan menggunakan faktur pajak digunggung. Selain itu, PT Y selalu memenuhi kewajiban dalam menyetor dan melaporkan PPN tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak ada masalah terkait PPN.

Sistem *Coretax* pertama kali digunakan di tahun 2025 bersamaan dengan perubahan tarif PPN sehingga PKP perlu untuk menyesuaikan sistem perpajakan yang baru beserta perhitungan PPNnya. Berdasarkan hal-hal diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN dengan sistem *Coretax*.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Jasa Konsultasi Bersama (JKB) Surabaya. Kegiatan PKL selama 3 bulan, dimulai pada 03 Februari 2025 dan berakhir pada 9 Mei 2025. Ruang lingkup meliputi mekanisme perhitungan hingga pelaporan SPT Masa PPN pada PT Y dengan sistem *Coretax*.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Konsultan JKB Surabaya.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah ke dalam praktik di tempat kerja.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN yang berlaku di tahun 2025
2. Bagi Perusahaan Tempat PKL
Penulis membantu meringankan penyelesaian tugas dan pekerjaan yang ada di tempat PKL.

3. Bagi Program Studi

Laporan ini dapat menjadi referensi tambahan mata kuliah perpajakan untuk membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan terkait Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penulisan tugas akhir terkait tempat PKL penulis.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori terkait tulisan akhir yang penulis pilih yang dijadikan sebagai pijakan yang mendukung keseluruhan tulisan akhir ini.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai kantor konsultan yang merupakan tempat untuk penulis melaksanakan PKL.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara mendetail terkait topik yang dipilih penulis selama menjalankan PKL.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan serta saran atas temuan penulis terkait topik yang dibahas.